



# Buletin Parlementaria

Nomor 1196/IV/IV/2022 • April 2022



## Komisi V Tinjau Lahan Calon Bandara Internasional di Tabalong Kalsel



3 Peringati Hari  
Kartini, Puan  
Maharani Ajak  
Kartini Muda Bantu  
Majukan Indonesia



4 Terima Aspirasi Buruh  
dan Mahasiswa,  
Pimpinan DPR Siap  
Beri Ruang Partisipasi



9 772614 339005



# Komisi V Tinjau Lahan Calon Bandara Internasional di Tabalong Kalsel

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamiha memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau lahan di Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mendukung rencana pembangunan bandara internasional di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (19/4).

“Kunjungan kerja reses ini dilakukan untuk menyerap usulan dari daerah sebelum dilakukannya pembahasan pendahuluan APBN tahun 2023. Oleh karena itu Komisi V menyebar ke Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara, kemudian ke Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat, agar semua aspirasi dari kabupaten/kota provinsi se-Indonesia bisa diserap oleh Pimpinan dan Anggota Komisi V,” urai Tamiha di sela-sela peninjauan.

Terkait usulan pembangunan bandara internasional, politisi PPP ini menjelaskan dirinya sudah menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan. Menhub menyampaikan, salah satu syarat agar pembangunan bandara internasional bisa disetujui adalah jarak bandara internasional terdekat lebih dari 200 kilometer. Sementara untuk posisi di Tabalong lebih dari 200 kilometer dari bandara di Banjarmasin dan dari Sepinggian Balikpapan, Kaltim.

“Jadi secara ekonomis juga hampir dipastikan *feasible* karena Tabalong adalah titik temu di antara beberapa provinsi di Kalimantan, selatan, timur dan tengah,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalsel I ini. Sehingga



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau lahan rencana pembangunan bandara internasional di Tabalong, Kalimantan Selatan. Foto: Oji/nvl

penumpang yang berasal dari Kalteng serta Hulu Sungai dan sekitarnya bisa mengakses lebih dekat.

Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani dalam kesempatan tersebut menegaskan Pemkab Tabalong memberikan dukungan sepenuhnya apabila pemerintah pusat ingin

”

**JADI SECARA EKONOMIS JUGA HAMPİR DIPASTIKAN FEASIBLE KARENA TABALONG ADALAH TITIK TEMU DI ANTARA BEBERAPA PROVINSI DI KALIMANTAN, SELAIN TIMUR DAN TENGAH**

membangun bandara internasional. Walaupun diakuinya tidak mudah untuk membangun bandara, tapi bila dikaitkan dengan Tabalong sebagai penyangga IKN, maka bandara menjadi kebutuhan.

“Terhadap usulan pembuatan bandara internasional baru di Tabalong dengan penyediaan lahan sekitar 200 hektare di Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung. Lokasi ini juga sudah masuk dalam RT-RW Kabupaten dan apabila lokasinya dinilai tidak layak, maka Pemkab Tabalong akan mencari lahan yang lain,” ujarnya.

Usulan pembangunan bandara internasional ini sebelumnya telah disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamiha ke pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan. “Alhamdulillah Wakil Ketua Komisi V sudah menyuarkan dengan Pak Menteri Perhubungan,” lapor Bupati Anang kepada Komisi V DPR RI. ■ oji/sf/ah



# Peringati Hari Kartini, Puan Maharani Ajak Kartini Muda Bantu Majukan Indonesia

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani

mengajak 'Kartini-Kartini' muda bergerak untuk bersama-sama memajukan Indonesia di momen peringatan Hari Kartini. Ia pun mengucapkan syukur atas dedikasi perempuan-perempuan Indonesia dalam pembangunan negara.

"Selamat memperingati Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat Indonesia. Dalam peringatan Hari Kartini tahun ini, saya mengajak masyarakat Indonesia mengingat kembali jasa RA Kartini dalam mengangkat harkat, martabat, dan derajat perempuan Indonesia," kata Puan dalam siaran persnya, Kamis (21/4).

Perjuangan Kartini di masa lampau telah melahirkan perempuan-perempuan hebat Indonesia yang memiliki banyak prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Untuk itu, Puan meminta agar perempuan Indonesia tidak melupakan jasa Kartini dan meneruskan perjuangannya untuk masa kini. "Maka saya mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk bersatu memajukan Bangsa dan Negara lewat karyanya masing-masing," kata politisi PDI-Perjuangan ini.



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nvl

Puan turut menyoroti peran perempuan di era pandemi Covid-19. Banyak peran perempuan di Indonesia yang membantu penanganan pandemi Covid-19. Utamanya para tenaga kesehatan (nakes) perempuan yang rela meninggalkan keluarganya untuk berada di garda terdepan melawan virus Corona.

Keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia tidak terlepas berkat kerja keras kaum perempuan. "Mulai dari dokter, perawat, ilmuwan, apoteker, dan staf medis lainnya. Bahkan dalam program vaksinasi Covid-19, kita melihat banyak sekali vaksinator yang datang dari kalangan perempuan," imbuhnya. ■

gal/sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pembertinaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firista Dysis, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Terima Aspirasi Buruh dan Mahasiswa, Pimpinan DPR Siap Beri Ruang Partisipasi



Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menerima perwakilan buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Andri/nvl

**P**impinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Korekku) dan Rachmat Gobel (Korinbang) menerima perwakilan buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan ini perwakilan buruh dan mahasiswa menyampaikan beberapa poin aspirasinya yang kemudian diterima oleh Pimpinan DPR dan akan disampaikan kembali pada pemerintah. Dalam diskusi ini, DPR siap akan memberikan ruang partisipasi bagi buruh terkait *omnibus law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kami selaku Pimpinan DPR, berdua dengan Pak Rachmat Gobel, barusan menerima aspirasi tersebut (aspirasi perwakilan buruh dan mahasiswa), dan ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian menjadi

masukannya bagi kami di DPR, untuk kemudian kita *share* ke teman-teman dan juga tentunya kepada pemerintah,” ujar Dasco bersama Rachmat Gobel usai menerima perwakilan buruh dan mahasiswa, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Beberapa poin aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan buruh dan mahasiswa ini di antaranya penghentian pembahasan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) kaitannya dengan UU Cipta Kerja. Kemudian penolakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di antaranya terkait upah buruh yang tidak ada kenaikan pasca pandemi, dan meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan *update* mengenai Reforma Agraria.

Kemudian mengenai penundaan revisi UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan meminta adanya keterlibatan kaum intelektual dan akademisi dalam penyusunan naskah revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, dan menyoroti mengenai praktik kerja lapangan (PKL) bagi pelajar yang tidak diberikan upah, hal ini seperti menstigma pelajar sejak dini untuk bekerja secara sukarela.

Tuntutan lainnya seperti penolakan mengenai kebijakan PPN 11 persen, kenaikan BBM, tol, gas elpiji dan listrik. “Ya yang dituntutkan seperti yang disampaikan pada yang waktu lalu, mengenai *omnibus law*, terus mengenai penurunan harga, kebutuhan bahan pokok, apalagi menjelang Lebaran ini dan dan hal-hal lain menyangkut pendidikan juga,” jelas Rachmat Gobel.

Di dalam pertemuan tersebut, Dasco pun menyinggung mengenai pembahasan *omnibus law* sebelumnya, dimana telah berusaha untuk dapat mengakomodir semua pihak terkait termasuk serikat pekerja, namun waktunya justru hampir habis untuk koordinasi. Ia pun meminta perwakilan buruh untuk dapat membentuk tim yang solid dan kompak sehingga untuk nantinya dapat memberikan masukan kepada DPR RI. “Kita ini ada di sini memang untuk menerima aspirasi dan menerima masukan, tapi masukan apa ya yang sama-sama jelas *gitu loh*, supaya kita memperjuangkannya juga enak,” tutur Dasco.

Mengenai *omnibus law*, Pimpinan DPR RI akan memberikan ruang bagi perwakilan buruh dan *stakeholder* untuk duduk bersama. “Jadi *temen-temen* ini agak terlambat menyampaikan aspirasinya, (pembahasan) Undang-Undang P3 itu sudah selesai. Namun kami dari diskusi tadi, ini kan soal *omnibus law*, nah kita membuka ruang nanti kepada kawan-kawan untuk selalu berkomunikasi. Karena kita juga belum tahu *nih* nanti *omnibus law*-nya akan diapakan di DPR,” ujar Dasco lebih lanjut. ■ gal/sf



# Gus Muhaimin: Indonesia Perlu Redefinisi dan Perubahan Strategi Pembangunan

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

Abdul Muhaimin Iskandar menyebut Indonesia memerlukan redefinisi dan juga perubahan strategi pembangunan dengan mengembalikannya pada panji-panji dasar kenegaraan. Menurutnya redefinisi dan perubahan ini mutlak diperlukan sebagai pengejawantahan gagasan politik kesejahteraan sebagai peta jalan menuju Indonesia maju.

“Kalau kita tidak mampu menyusun langkah baru negara kesejahteraan, langkah baru strategi pembangunan, jangan salah bangsa ini juga akan gagal, yang besar-besar akan gagal,” kata Gus Muhaimin, saat menghadiri Ramadan *Public Lecture* bertajuk ‘Desain Politik Kesejahteraan untuk Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan’ yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Kamis (14/4).

Gus Muhaimin berujar, perubahan strategi pembangunan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis, baik ekonomi, sosial, dan juga politik. “Ada kasus BLBI di mana semua konglomerat mengalami kehancuran, hingga berdampak pada munculnya *moral hazard*. Hari ini kita juga akan mengalami hal yang sama apabila kita tidak benar-benar mengerti dan memahami betul keputusan yang ada,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, saat ini benih krisis tersebut sudah mulai ada, misalnya ketika terjadi kelangkaan



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Ist/nvl

minyak goreng serta naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok belakangan ini. “Kalau kemudian dominasi pengusaha di bidang CPO (crude palm oil) dan minyak goreng tidak mau diatur pemerintah, atau pemerintah tidak berdaya menghadapi keadaan ini, nanti akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri maupun pengusaha-perusahaan besar itu,” ungkap Gus Muhaimin.

“Bumerang itu antara lain terjadi akibat dari kesenjangan yang terjadi. Apalagi tragedinya kemarin ada yang antri minyak sampai ada yang meninggal, itu sudah ancaman kemarahan yang membahayakan. Belum lagi kalau harga kebutuhan pokok naik itu juga

akan membahayakan, memunculkan kecemburuan, konflik, perpecahan dan kerusakan ekonomi,” imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut.

Keponakan Gus Dur ini menilai dinamika tersebut sebagai *warning* untuk segenap bangsa Indonesia, terutama pemerintah bahwa keadaan bisa sulit apabila tidak bisa diatasi dengan baik. Terlebih kalau momentum perbaikan ekonomi saat ini terlambat mengatasi keadaan dan menjadikan kehidupan ekonomi dan politik menjadi runyam. “Hari ini dan ke depan kita diuji dan dituntut untuk memberikan jawaban atas keadaan yang tidak menentu dan belum ada gambaran untuk diatasi di masa yang akan datang,” tukasnya. ■ sf

# Komisi I Usul Pendekatan Kesejahteraan Nelayan untuk Atasi Konflik Natuna

**A**nggota Komisi I DPR RI AI Muzammil Yusuf mengusulkan strategi pendekatan industri yang mengutamakan kesejahteraan nelayan dan tidak hanya terfokus pada pendekatan militer dalam mengatasi konflik di wilayah perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Ia berpendapat kehadiran nelayan di wilayah *grey area* akan menegaskan kepada negara lain bahwa wilayah tersebut adalah wilayah ZEE Indonesia yang mengakui sistem hukum laut United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

“Jika kita bicara sejauh ini nelayan harus hadir, tidak hanya *coast guard*. Kita bisa katakan nelayan kita *engga* bisa di situ pendekatannya bukan saja hanya pendekatan militer, tetapi juga pendekatan kesejahteraan nelayan kita,” terang AI Muzammil saat menghadiri pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Sestama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Laksamana Pertama Hadi Pranoto dan jajarannya, di Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (16/4).

AI Muzammil menceritakan, pada kunjungan Komisi I DPR RI ke Kepulauan Natuna beberapa waktu lalu, kelompok nelayan di daerah tersebut mengeluhkan tidak adanya

dukungan pemerintah terhadap nelayan lokal dan justru menghadirkan kelompok nelayan dari daerah lain. Ia melihat konflik seperti ini bisa dihindari jika pemerintah dapat mengimbangi dengan memberikan dukungan kepada nelayan lokal dan penyediaan logistik yang memadai, sehingga akan banyak nelayan yang berkumpul di Laut Natuna Utara untuk mencegah masuknya nelayan asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia.

“Nelayan itu datang ke kita waktu itu. Ada tiga kelompok nelayan. Ribut mereka, ada dari Madura dan (wilayah) lainnya. Mereka (nelayan Natuna) menegaskan kalau itu bukan daerahnya Madura, tapi daerahnya kami (Natuna). Jadi ini di dalam kita ada keributan antar nelayan, karenanya yang harus kita bicarakan pendekatan kesejahteraan selain pendekatan militer. Kalau kapal nelayan kita kuat pak, itu mereka akan kumpul disitu bareng-bareng,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Laksamana Pertama Hadi Pranoto mengatakan jika pihaknya dan pemerintah telah mencoba untuk mengisi kekosongan daerah perbatasan Laut China Selatan dengan menghadirkan kelompok



Anggota Komisi I DPR RI AI Muzammil Yusuf.  
Foto: Tasya/rvi

nelayan dari luar Natuna pada 2020 lalu. Namun, selain terjadi konflik dengan nelayan lokal, kelompok nelayan yang dihadirkan tidak mampu untuk melakukan aktivitas perikanan di perairan tersebut dikarenakan kurang memadainya kapal dan peralatan serta ombak yang sangat kuat sehingga kembali ke daerah asalnya.

“Sebenarnya upaya ini pendekatannya adalah sumber daya manusia kita sendiri. Begitu didatangkan orang Jawa kesana *sebenarnya* orang itu potensi, tapi orang lokal tidak terima karena sumber daya alamnya merasa dikurangi. Kita waktu itu gerakan lebih dari 30 lebih kapal dari Jawa. Karena wilayah sana ombaknya juga 3-4 meter. Makanya kalau ini berlanjut sebetulnya akan ada pengembangan di situ, ya orang kita akan mampu. *Udah* kita akan tingkatkan tapi ada konflik jadi pulang lagi semua mereka,” terang Hadi kepada Komisi I DPR RI. ■ nap/sf



# Komisi II Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut Cukup Baik

**M**asa pandemi Covid-19 yang telah dirasakan dalam waktu setahun lebih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama dalam hal memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Transformasi pelayanan publik ke arah digital menjadi suatu keharusan agar masyarakat tetap mendapat pelayanan publik yang prima.

”

**TERKAIT DENGAN  
BLANGKO E-KTP, TADI  
SUDAH DISAMPAIKAN,  
MARET SUDAH DICETAK  
LAGI DI KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI**

Wakil Ketua Komisi II DPR RI  
Saan Mustopa. Foto: Bianca/mvl



Untuk itu, Komisi II DPR RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 mengunjungi beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Garut, Jawa Barat, guna melihat langsung penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik di masa pandemi serta pelaksanaan program prioritas pertanahan serta persiapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai, secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut cukup berjalan dengan baik dan tidak terlalu terkendala meski di tengah pandemi. “Kabupaten Garut cukup baik dari segi pelayanan dan sebagainya cukup baik,” ujarnya usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi II dengan Bupati Garut beserta jajaran, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Garut, Kakanwil BPN Garut, Pimpinan KPU dan Bawaslu Kab. Garut serta perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, di Kantor Bupati Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (18/4).

Meski dinilai sudah berjalan cukup baik, ada beberapa permasalahan yang diungkapkan Bupati Garut Rudy Gunawan yang perlu diurai di Kabupaten Garut. Di antaranya permasalahan blangko e-KTP. Bupati Rudy mengungkapkan bahwa di Kabupaten Garut, ketersediaan blangko e-KTP masih belum memadai dan distribusi blangko e-KTP yang belum berjalan lancar di wilayah Garut.

Merespon hal tersebut, Saan mengatakan Kementerian Dalam Negeri sudah mencetak kembali blangko e-KTP dan hanya tinggal menunggu distribusi-distribusi ke daerah. “Terkait dengan blangko e-KTP, tadi sudah disampaikan, Maret sudah dicetak lagi di Kementerian Dalam Negeri, mungkin tinggal distribusi ke daerah-daerah yang memang dianggap mengalami kekurangan terkait blangko e-KTP. Hal itu tentunya sudah teratasi karena memang sudah tersedia di Kementerian Dalam Negeri,” sebutnya. ■ [bia/sf](#)

# Komisi II Dorong Kota Cirebon Segera Bangun Mal Pelayanan Publik

**K**omisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Cirebon, Jawa Barat, guna membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Selain itu penanganan permasalahan kasus pertanahan, serta persiapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kota Cirebon.

Dalam bahasan mengenai bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Cirebon sendiri, Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti hal menarik yang dimiliki Kota Cirebon yang menjadi pusat kegiatan perdagangan maupun hal pelayanan publik, dimana masyarakat di kota-kota sekitarnya membutuhkan Kota Cirebon dalam memanfaatkan fasilitas

publik terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Letak Kota Cirebon berada di jalan perlintasan barat ke timur, tepatnya di jalur Pantai Utara (Pantura), menjadikan Kota ini sebagai sentra ekonomi di kawasan tersebut. Cirebon menjadi sentra dari kegiatan perekonomian di wilayah Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan), termasuk beberapa kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah seperti Brebes dan Tegal.

“Termasuk misalnya bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik, Cirebon adalah kota yang menjadi pusat bukan saja untuk warga yang ber-KTP Kota Cirebon, tapi ternyata kota-kota sekitarnya juga sangat membutuhkan Kota Cirebon (dalam hal) untuk perdagangan. Produk-

produk (dagang) luar Cirebon juga ada disini, termasuk juga misalnya fasilitas kesehatan (maupun) pendidikan itu yang mengakses bukan saja warga Cirebon tapi juga orang lain (di luar Kota Cirebon). Menariknya dari Kota Cirebon juga memberikan efek (manfaat) kepada wilayah sekitarnya, disamping wilayah di sekitarnya juga mendapatkan efek baik bagi Kota Cirebon sendiri,” jelas Yanuar usai pertemuan di Kantor Wali Kota Cirebon, Senin (18/4).

Dari penuturan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis pada pertemuan tersebut diketahui Kota Cirebon sendiri belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), padahal MPP begitu penting untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, Yanuar mendorong Kota Cirebon untuk segera membangun Mal Pelayanan Publik.

“Tadi catatan pentingnya *how to* meningkatkan pelayanan publik dalam kota yang semacam ini dengan usul, percepat dong (pembangunan) mal pelayanan publik. Karena di tempat lain sudah ada kenapa di Cirebon belum, padahal Cirebon tergolong kota yang cukup maju di Jawa Barat. Mal pelayanan publik akan membantu masyarakat mempermudah akses pelayanan, tidak repot, tidak ribet,” tegas politisi PKB tersebut.

Yanuar kemudian membandingkan bagaimana sulitnya menjangkau tempat-tempat untuk mengurus hal berkaitan pelayanan publik pada jaman dahulu dengan adanya MPP sekarang ini yang telah memudahkan masyarakat. “Anda bayangkan kalau zaman dulu pelayanan publik dari sudut tata ruang pelayanan aja (tempatnyanya) ada satu di sini, satu di sana, luar biasa repot, satu tapi kalau Mal Pelayanan Publik kan ada di satu titik, satu tempat dan itu akan memudahkan semua warga pengguna pelayanan oleh karena itu kita dorong (percepat pembangunannya),” pungkask legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X tersebut. ■ nvl/sf



Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemkot Cirebon, di Kantor Wali Kota Cirebon. Foto: Novel/nvl



# Tangguh Hadapi Pandemi Covid-19, Komisi II Apresiasi Pencapaian Pemkot Sukabumi



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin kunker Komisi II DPR RI ke Sukabumi. Foto: Saum/nvl

**K**omisi II DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Sukabumi memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima dan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki sepanjang tahun 2021-2022. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi sekaligus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat di Kota Sukabumi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Balai Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (18/4). Dirinya menilai pencapaian ini patut dibanggakan di tengah pandemi Covid-19 masih melanda di Indonesia.

“Yang paling penting itu, apa yang kami lihat di Kota Sukabumi ini boleh dikatakan penyelenggaraan pemerintahan itu cukup baik dengan

”

**INI MENGGAMBARCAN BAHWASANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA YANG ADA DI KOTA SUKABUMI DENGAN CUKUP BAIK. TENTU, ADA STAKEHOLDER YANG IKUT DALAM MEMBANTU URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 3,75 persen. Kemudian IPM-nya juga meningkat mencapai 74 persen.

itu bagus sekali,” tutur Syamsurizal kepada *Parlementaria*.

Ia pun menyoroti soal bagaimana Pemerintah Kota Sukabumi mampu mengatasi kawasan kumuh yang sebelumnya meliputi sekitar 39 hektar, namun kini turun hingga tersisa 8 hektar saja. Baginya, komitmen untuk menangani permasalahan yang dekat dengan masyarakat tidak lepas dari dukungan setiap *stakeholder* yang meliputi pemerintah, lembaga, sekaligus masyarakat sekitar.

“Ini menggambarkan bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan telah melaksanakan tugasnya yang ada di Kota Sukabumi dengan cukup baik. Tentu, ada *stakeholder* yang ikut dalam membantu urusan pemerintah daerah,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu.

Oleh karena itu, ke depannya Syamsurizal ingin setiap komponen Pemerintah Kota Sukabumi tetap mempertahankan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih bersama. Sehingga, Kota Sukabumi menjadi kota yang aman, sejahtera, dan produktif.

Menanggapi apresiasi tersebut, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi berharap, dengan terpilihnya Kota Sukabumi sebagai tujuan kunjungan kerja Komisi II DPR RI dapat turut memberikan dukungan berupa membantu mengadvokasi masukan dan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, ia optimis dukungan tersebut dapat memacu percepatan perbaikan kualitas keuangan daerah serta sumber daya aparatur daerah. ■ ts/sf

# Komisi III Catat Banyak Kasus Besar Perlu Ditindaklanjuti Polda Sumsel

**K**omisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir melaksanakan Kunjungan Kerja Reses dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Sumatera Selatan. Salah satu agenda kunker tersebut adalah melakukan pengawasan kinerja terhadap mitra Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel. Adies menilai banyak kasus besar di Sumsel yang menarik perhatian masyarakat dan perlu segera ditindaklanjuti Kapolda Sumsel beserta jajaran.

“Seperti, kejahatan narkoba, korupsi, pelanggaran hukum terhadap

sumber daya alam, dan lainnya yang menghiasi media. Ditambah pula dengan persoalan ekonomi, baik nasional maupun global, yang mempengaruhi situasi masyarakat sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban,” ujar Adies dalam sambutannya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda Sumsel dan BNNP Sumsel di Palembang, Sumsel, Senin (18/4).

Oleh karena itu, Adies meminta agar Polda Sumsel menyampaikan perihal capaian, target, dan evaluasi kinerja, termasuk kebutuhan anggaran yang masih jadi hambatan dalam

mewujudkan sistem pelayanan hukum yang berkeadilan, dan bertata kelola yang akuntabel dan profesional.

“Dalam kunker kali ini Komisi III DPR RI juga memandang perlu mendapatkan penjelasan terkait persiapan keamanan mudik, kebutuhan sembako masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri,” jelas Adies usai pertemuan.

Terakhir, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menegaskan, Komisi III DPR RI juga ingin mendengar masukan dan partisipasi publik seluas-luasnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan RUU Narkotika yang akan segera dilakukan pembahasan. “Komisi III DPR RI membuka masukan dari mitra daerah agar dapat disampaikan secara langsung maupun via email,” tutupnya.

Hadir pula Anggota Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap, I Wayan Sudirta, Adde Rosi Khoerunnisa, Sari Yulita, Bimantoro Wiyono, Taufik Basari, Heru Widodo, Didik Mukrianto, Agung Budi Santoso, Achmad Dimiyati Natakusumah, Nazaruddin Dek Gam, dan Siti Nurizka Puteri Jaya. Komisi III DPR RI diterima Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, dan Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Djoko Prihadi beserta jajaran. ■ rdn/sf



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bertukar cenderamata dengan Kapolda Sumsel setelah Kunjungan Kerja Reses. Foto: Ridwan/nvl



# Komisi III Soroti Permasalahan Judi dan Peredaran Narkoba di Riau

**T**im Kunjungan Reses Komisi III DPR RI menyoroti sejumlah permasalahan di Provinsi Riau, di antaranya

terkait maraknya judi saat bulan Ramadan, termasuk beberapa perusahaan sawit yang diduga menanam pohon sawit merambah hingga hutan lindung. Bahkan, tanaman-tanaman tersebut melebihi Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan sawit. Komisi III DPR RI pun meminta Kapolda Riau untuk menanganinya.

“Dari hasil kunjungan didapati bahwa judi *online* dan judi konvensional selama bulan puasa makin marak dan

”

**POLDA RIAU DENGAN SEMANGAT AKAN MEMPERBAIKI DAN MELAKUKAN PENATAAN, PEMBINAAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM RIAU.**

Kapolda Riau berkomitmen selama menjabat sebagai pimpinan Polri di daerah tidak akan ada lagi judi lagi di Pekanbaru,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI rapat dengan Kapolda Riau dan Kepala BNNP Riau di Pekanbaru, Jumat (15/4).

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa untuk memotong

*di Provinsi Riau*



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh bertukar cenderamata dengan Kapolda Riau. Foto: Hira/nv

masuknya peredaran narkoba dari luar negeri seperti Malaysia, Indonesia akan membentuk posko. Menurut Pangeran, secara geografis wilayah Riau, dari Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) hingga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terdapat wilayah perbatasan dengan negara tetangga sepanjang 370 mil atau 685,24 kilometer.

Sehingga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, posko tersebut dapat efektif untuk memotong jalur peredaran narkoba dari jalur Rohil dan Inhil yang merupakan masuknya jalur narkoba jaringan internasional. “Dari *entry point* yang disampaikan BNNP, mudah-mudahan ini bisa menjadi

agenda kita ke depan terkait posko untuk memotong masuknya narkoba (ke wilayah Indonesia),” kata Pangeran.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengungkapkan, Polda Riau dengan semangat akan memperbaiki dan melakukan penataan, pembinaan serta penegakan hukum di wilayah hukum Riau. “Terima kasih untuk tim Komisi III yang hari ini melakukan rapat dengan kami, saya kira semangatnya memperbaiki kinerja Polda Riau untuk melakukan tugas-tugas kepolisian untuk masyarakat bangsa dan negara khususnya di Provinsi Riau,” komitmen Kapolda Riau. ■ hal/sf

# Komisi IV Apresiasi Pembentukan Pansus Konflik Kawasan Hutan dan Perkebunan oleh DPRD Jambi



Foto bersama Tim Kunker Komisi IV DPR RI dengan Forkompimda dan DPRD Jambi. Foto: Tiara/nvl

**K**etua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan apresiasinya atas langkah DPRD Provinsi Jambi yang telah membentuk pansus konflik lahan khususnya terkait konflik di kawasan hutan dan perkebunan. Melalui pertemuan ini, Komisi IV DPR RI telah menerima 107 laporan konflik lahan di Provinsi Jambi dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikannya.

“Ini kita sangat apresiasi dengan inisiatif dari DPRD Provinsi Jambi yang membentuk pansus konflik lahan. Ini baru satu-satunya DPRD Provinsi Jambi yang ngotot untuk menyelesaikan

konflik lahan. Banyak provinsi lain yang memiliki banyak kasus konflik lahan seperti Riau, Kalimantan dan Jambi. Kita apresiasi kerja DPRD Provinsi Jambi,” ungkap Sudin di sela-sela agenda kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Jambi, Selasa (19/4).

Hal senada turut diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat yang menilai positif inisiatif dari DPRD Provinsi Jambi yang membentuk pansus dengan melibatkan Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) bersinergi menjadi satu untuk menyelesaikan konflik perkebunan dan kehutanan yang ada di Jambi.

la menekankan Komisi IV DPR akan terus mengawal untuk kepentingan masyarakat Jambi demi mewujudkan keadilan sosial.

“Sesuai dengan amanat konstitusi maka kami Komisi IV DPR berpihak pada kepentingan yang lebih luas, memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan lebih luas itu kan sesuai amanat konstitusi, ini yang akan diperjuangkan. Maka kami akan backup kerja dari Pansus Penyelesaian Konflik Perkebunan dan Kehutanan di Jambi ini,” ungkap Djarot.

Lebih lanjut dirinya berharap nantinya pola-pola yang dijalankan maupun direkomendasikan oleh Pansus dapat membuahkan hasil sehingga menjadi model untuk diterapkan di daerah lain. “Negara tidak boleh kalah dengan korporasi, apalagi saya liat forkopimda kompak, saya mengapresiasi kerja-kerja pansus konflik lahan demi terwujudnya keadilan sosial,” imbuh Djarot.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyebutkan bahwa dasar dibentuknya pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi ini karena banyaknya persoalan konflik lahan. Hal lain yang diungkapkan oleh Edi Purwanto bahwa banyak sekali tuntutan kepada DPRD Provinsi Jambi melalui unjuk rasa untuk DPRD Provinsi Jambi menyelesaikan konflik lahan.

“Hampir setiap minggu di DPRD Provinsi Jambi ini demo terkait dengan konflik lahan. Atas dasar itulah kami membentuk pansus konflik lahan dengan harapan kerja-kerja DPRD Provinsi Jambi ini bisa menyelesaikan kasus-kasus konflik lahan di Jambi,” pungkas Edi Purwanto.

Diskusi penyelesaian konflik lahan ini, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Provinsi Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Dirjen Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Direktur Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Provinsi Jambi, serta Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. ■ tra/sf



# Desa Korporasi Sapi Bisa Penuhi Kebutuhan Daging Sapi



Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau desa korporasi di Penajam Paser Utara. Foto: Huseni/nvl

**K**onsep pengembangan desa korporasi sapi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kelak diproyeksikan bisa menjawab tantangan kebutuhan daging sapi di Kaltim dan daerah-daerah lain. Ini merupakan program prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) sejak 2021 lalu.

Demikian mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten PPU dan perwakilan Kementan RI di Desa Labangka Barat, Kaltim, Selasa (19/4). Di desa ini ada kelompok tani bernama Petani Maju yang dipercaya mengelola sekitar 100 sapi, baik sapi indukan

maupun penggemukan. Bahkan, sapi-sapi ini sudah diasuransikan ke PT Jasindo oleh Kementan. Jadi, bila ada yang mati akan diganti.

“Program pengembangan sapi ini sudah sangat baik. Peternakan kini sudah menjadi ekosistem usaha. Masyarakat menyediakan lahannya dan bantuan sapi diasistensi pemerintah. Bahkan, sapinya dilindungi dengan asuransi serta diberi pakan yang memadai. Saya rasa ini konsep yang baik. Desa korporasi sapi ini merupakan jawaban dari kebutuhan rakyat di Kaltim,” ungkap Budi.

Apalagi, kelak bila pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sudah rampung, akan banyak penduduk bermigrasi. Dan kebutuhan daging sapi pasti meningkat. Selama ini, kata Budi, Kaltim selalu kekurangan pasokan

daging sapi. Kebutuhan daging sapi yang tinggi itu didatangkan dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB, pulau Jawa, bahkan Lampung. Disampaikan politisi Partai Gerindra tersebut, Kaltim sebetulnya belum mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk warganya.

Dengan adanya desa korporasi sapi ini, perlahan Kaltim bisa mandiri dan kelak bisa membantu daerah lain yang kekurangan pasokan daging sapi. “Masalah kebutuhan daging sapi masih jadi keluhan masyarakat. Daging sapi masih mahal. Ketersediaan masih belum seimbang dengan kebutuhan. Nah, dengan program desa korporasi sapi ini bisa jadi jawaban kebutuhan daging sapi, bukan cuma di Kaltim tapi juga provinsi lain,” harap legislator dapil Kaltim itu. ■ mh/sf

# Komisi IV Soroti Masih Tingginya Harga Minyak Goreng di Sultra

**M**asih tingginya harga jual minyak goreng curah yang dipasarkan di Sulawesi Tenggara mendapat sorotan dan menjadi catatan penting bagi Komisi IV DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini, perlu ada solusi nyata dari pemangku kebijakan terkait agar masyarakat tidak semakin terbebani hidupnya akibat tingginya harga minyak goreng.

“Harga minyak goreng curah yang dijual di pasaran di Provinsi Sulawesi Tenggara ini harganya mencapai Rp25000 per liter. Tentu hal ini menjadi catatan tersendiri bagi Komisi IV DPR, dan itu harus ada solusinya, agar ketika sampai ke masyarakat tidak sebesar itu harganya,” kata Anggia saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR ke Kota Kendari, Sultra, Senin (18/4).

Pada kesempatan yang sama, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV DPR ke Sultra adalah untuk mendapatkan

masukan dan informasi tentang ketersediaan dan pasokan komoditas pupuk bersubsidi dan bahan pangan pokok lainnya menghadapi Hari Raya Lebaran tahun ini.

“Kita ingin melihat beberapa hal yang memang perlu mendapatkan perhatian, khususnya mengenai masalah pangan menjelang Lebaran di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk soal minyak goreng yang sudah sejak beberapa bulan yang lalu hingga hari ini masih menjadi persoalan yang

luar biasa. Termasuk juga di dalamnya mengenai ketersediaan bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan Lebaran, seperti daging sapi,” ucap Anggia.

Ia menyatakan, di beberapa daerah lain di Indonesia, Komisi IV DPR juga masih melihat banyak permasalahan yang terkait dengan isu-isu pertanian, termasuk persoalan daging sapi dan minyak goreng. “Untuk itu kita ingin menyerap masukan dan aspirasi dari para *stakeholder* pemangku kebijakan yang ada, jika seandainya ada permasalahan yang terkait isu-isu pertanian yang memang perlu kita pecahkan bersama di Provinsi Sulawesi Tenggara ini,” tutup Anggia. ■ dep/sf

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Foto: Dep/nvl



”

**MINYAK GORENG YANG SUDAH SEJAK BEBERAPA BULAN YANG LALU HINGGA HARI INI MASIH MENJADI PERSOALAN YANG LUAR BIASA**



# Komisi V Harapkan Program BSPS Kementerian PUPR Dapat Berjalan Optimal

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengharapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat mengoptimalkan berjalannya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya dalam membantu perbaikan rumah para korban bencana alam.

“Dalam hal ini, kita (Komisi V DPR RI) lebih mendorong khususnya untuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, agar dapat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengalami bencana gempa bumi ini, terutama untuk perbaikan kondisi rumah mereka,” tegasnya usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Senin (18/4).

Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni. Dalam hal ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menggulirkan bantuan Program BSPS atau dikenal dengan bedah rumah ke beberapa daerah di wilayah Sumbar.

“Kita berharap, mudah-mudahan Program (BSPS) ini juga bisa kita persiapkan bukan hanya untuk memperbaiki rumah-rumah yang ada dalam konteks normal, tetapi dalam kondisi bencana alam pun, program ini kira diharapkan bisa dapat memberi dukungan kepada masyarakat kita



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Sumatera Barat. Foto: Hanum/hvl

secara langsung,” harap politisi Partai Gerindra itu.

Karena itu, Andi Iwan juga menegaskan, peran aktif pemerintah pusat sangat diperlukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Hadir dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi V DPR RI lainnya, yakni Athari Gauthi Ardi dan H.A Bakri dari F-PAN, Mulyadi (F-Gerindra), Ruslan M Daud (F-PKB), Ishak Mekki (F-Demokrat), serta Sigit Sosiantomo dan Syahrul Aidi Maazat dari F-PKS.

Selain itu, hadir pula Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, Bupati Pasaman Benni Utama, Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, serta mitra Kerja Komisi V DPR RI (Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa

”

**PROGRAM BSPS MERUPAKAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) UNTUK MENDORONG DAN MENINGKATKAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH MENJADI LAYAK HUNI.**

PDTT, Badan SAR Nasional/BNPP, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika/BMKG). ■ hnm/sf

# Komisi V Komitmen Kawal Pembangunan IKN



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI berfoto di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Foto: Puntho/nvl

**A**nggota Komisi V DPR RI Irwan menyatakan Komisi V DPR RI berkomitmen penuh siap mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar dapat terlaksana sebagaimana rencana. Meski demikian, Irwan menegaskan Komisi V DPR RI tetap memberikan berbagai pandangan kritis yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam pembangunan IKN Nusantara yakni terutama diperlukan perencanaan skema pembangunan komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar sebagai penyangga IKN serta pembangunan wilayah terdekat dalam hal ini kawasan timur Indonesia.

Hal itu disampaikan Irwan saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Titik Nol IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (18/4) "Terdapat tiga tujuan utama IKN yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia serta sebagai

penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Maka, kegiatan perencanaan dan pembangunan IKN tentu menjadi tugas bersama dalam rangka mendorong percepatan pemerataan dan meningkatkan perekonomian kawasan timur Indonesia," jelas Irwan.

Politisi Partai Demokrat tersebut lebih lanjut menuturkan, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Pusat meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas. Terutama, tandas Irwan, seperti

”

**PERATURAN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBATASI RUANG GERAK ATAUPUN FLEKSIBILITAS**

jalan dan jembatan serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan di wilayah terdekat dalam hal ini kawasan timur Indonesia. Tak hanya itu, diperlukan dukungan secara maksimal terhadap upaya pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN Nusantara menjadi *smart forest city* yang ramah lingkungan.

"Terlebih, pembangunan IKN Nusantara sekaligus juga dimaksudkan sebagai *role model* kota di Asia. Maka, Komisi V DPR RI menekankan kepada Pemerintah Pusat terutama dalam hal pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergisitas lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Termasuk, koordinasi terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara," pungkask legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur ini. ■ pun/sf



# Komisi VI Cek Kesiapan BUMN Hadapi Libur Lebaran 2022

mulai pulih, lantas dari Pertamina atau dari PLN belum siap untuk mengantisipasinya.

“Terkait dengan kenaikan harga yang terjadi memang kita juga memahami bahwa tekanan global ini cukup kuat, sehingga harus dilakukan penyesuaian harga. Tapi kita juga ingin Peralite sebagai bahan bakar yang dibantu oleh negara itu bisa tersedia cukup banyak, sehingga kalau nanti pariwisata di Bali semakin hidup, jangan sampai kemudian terhambat transportasinya karena kekurangan pasokan BBM,” tandas Martin. ■ eki/sf

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengecek kesiapan sejumlah perusahaan BUMN seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Aviastar Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam menghadapi libur dan cuti bersama Idulfitri 2022 di Provinsi Bali.

“Untuk Pertamina dan PLN kita ingin mengetahui bagaimana mereka mempersiapkan ketersediaan energi dalam menyambut Idulfitri ini, dan juga proyeksi ke depan sebagai dampak dari perang Ukraina dan Rusia,” terang Martin usai memimpin rapat Komisi VI DPR RI dengan dengan Eselon I Kementerian BUMN beserta Direksi PLN, Pertamina, PGN, Aviastar Pariwisata Indonesia, dan Angkasa Pura I, di Denpasar, Bali, Senin (18/4).

Selain terkait kesiapan jelang libur Lebaran 2022, dalam pertemuan bersama para *stakeholder* juga membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata, dengan contoh kasus di Bali. “Berdasarkan data yang disampaikan Angkasa Pura I itu *traffic*-nya sudah mulai pulih dan kemarin puncaknya sampai di 4.800 per hari. Ini akan terus kita pantau seperti

apa *recovery* ke depannya,” ucap Martin lebih lanjut.

Jika *traffic* ini semakin baik, lanjut politisi Partai NasDem tersebut, tentu akan semakin bagus dan bisa menopang pariwisata yang ada di Bali. Namun ia mengingatkan jangan sampai ketika pariwisata di Bali itu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Eki/mv



# Komisi VI Pastikan Kesiapan BUMN Jelang Idulfitri

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji, menyampaikan bahwa Komisi VI DPR memastikan kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelayanan kepada masyarakat saat Lebaran. Sejumlah BUMN yang dipastikan kesiapannya adalah PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, PT Rajawali Nusantara Indonesia/ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Pertamina Patra Niaga.

“Kami ingin memastikan masyarakat terlayani dengan baik pada saat Lebaran. Di mana pada saat Lebaran ada ritual yang sangat besar, yaitu orang mudik dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan. Apalagi diperkirakan mudik pada tahun 2022 adalah mudik yang luar biasa besar sebab sudah dua tahun masyarakat tidak bisa mudik, karena itu butuh persiapan yang sangat besar,” papar Sarmuji saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/4).

Diketahui, arus mudik Lebaran akan dimulai pada tanggal 22 April 2022 (H-10) sampai arus balik yaitu diperkirakan sampai 10 Mei 2022 (H+7). Untuk itu, Sarmuji menyampaikan bahwa yang menjadi fokus BUMN untuk persiapan hari Raya Idulfitri di tahun 2022 ini adalah pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui ketersediaan sarana, prasarana, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

“Misalnya di Pertamina, seperti kemarin ada masalah kelangkaan solar, jangan sampai pada saat dibutuhkan ada LPG yang tidak tersedia. Begitu pula untuk PT KAI, kalau bisa jangan

”

**DIPERKIRAKAN MUDIK PADA TAHUN 2022 ADALAH MUDIK YANG LUAR BIASA BESAR SEBAB SUDAH DUA TAHUN MASYARAKAT TIDAK BISA MUDIK, KARENA ITU BUTUH PERSIAPAN YANG SANGAT BESAR**

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji. Foto: Ica/nvl



ada lagi masyarakat yang menumpuk untuk membeli tiket karena sekarang pembelian tiket sudah bisa dilakukan melalui sistem *online*,” jelas Sarmuji.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta kesiapan dari sisi infrastruktur di jalan tol. Sarmuji meminta agar PT Jasa Marga memperhatikan secara detail, bahkan hingga kebersihan toilet. “Jangan sampai masyarakat enggan menggunakan toilet di *rest area*. Sampai sekecil itu kami cek agar masyarakat benar-benar terlayani dengan baik,” jelas legislator daerah pemilihan Jawa Timur VI tersebut.

Sarmuji berharap agar masyarakat dapat melakukan kegiatan mudik Lebaran di tahun 2022 ini dengan lancar dan bahagia. Oleh karena itu, pelayanan transportasi mudik, rantai pasokan kebutuhan lebaran, pasokan energi kebutuhan transportasi, keperluan rumah tangga, dan keperluan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa serta keperluan Idulfitri dan libur Lebaran 2022 ini dapat dipersiapkan secara optimal oleh BUMN terkait. ■ Ica/sf



# Jelang Hari Raya Idulfitri, Komisi VI Pastikan Kesiapan BUMN Energi



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bertukar cenderamata dengan mitra kerja. Foto: Oji/nvi

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI memastikan kesiapan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN menjelang Hari Raya Idulfitri dan Libur Lebaran di Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui kementerian dan perusahaan BUMN telah melakukan beberapa persiapan-persiapan dengan membuat program dan aplikasi yang dapat digunakan masyarakat. Program dan aplikasi tersebut diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan efisien guna memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jadi, berdasarkan laporan, segala sesuatunya (terkait persiapan Lebaran) sudah terpapar secara sistematis dan bagus. Baik mengenai cara untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di

perjalanan, pasokan listrik, maupun gas yang dibutuhkan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, serta direksi PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Perusahaan Listrik Negara, di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (18/4).

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina juga menyampaikan prediksi peningkatan dan penurunan konsumsi gas. Konsumsi gas LPG 3kg atau gas melon diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 6,7 persen dibandingkan dengan konsumsi normalnya. Sedangkan penggunaan gas non-PSO baik rumah tangga dan bukan rumah

tangga masih di bawah LPG 3kg, bahkan mengalami penurunan. Namun menurut Siti, penyaluran gas melon kepada masyarakat masih belum tepat sasaran.

“Gas melon semestinya diarahkan dan disasarkan untuk masyarakat bawah. Sehingga jangan sampai pemanfaatannya, dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat (mampu) yang seharusnya bukan menggunakan

gas melon. Jadi kita harap, hal tersebut menjadi bagian dari regulasi yang lebih didisiplinkan kepada masyarakat,” pinta politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Siti mengingatkan, layanan pengaduan merupakan hal utama yang juga dibutuhkan masyarakat selama Hari Raya Idulfitri dan libur Lebaran. “Hal utama ketika semua program sudah dioptimalkan, adalah sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimanapun juga masyarakat harus mengetahui dan paham kemana mereka harus menghubungi dan mengadu ketika dalam posisi sulit saat mengalami kendala. Baik terkait dengan listrik, gas dan bahan bakar,” tukas legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut. ■ mcn/sf

# Fadli Zon Tekankan Pentingnya Kerja Sama Internasional Indonesia-Slovakia



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bertukar cenderamata dengan Wamenlu Slovakia Martin Klus di Gedung DPR RI. Foto: Runi/nvl

**K**etua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan, pentingnya hubungan kerjasama internasional antara Indonesia dan Slovakia. Politisi Partai Gerindra ini menilai Slovakia memiliki posisi penting dalam bidang pertahanan, pariwisata dan perdagangan yang akan memberikan dampak positif bagi Indonesia.

“Hari ini kami mendapat kunjungan dari Wakil Menteri Luar Negeri Slovakia Martin Klus kedatangan bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Slovakia

dalam segala bidang, mereka sendiri memiliki posisi yang kuat dalam bidang pertahanan hingga perdagangan yang akan berikan dampak positif bagi negara kita,” sebut Fadli Zon saat menerima Wamenlu Slovakia Martin Klus di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).

Fadli menambahkan, Slovakia juga ingin memperkuat hubungan antar Parlemen dengan Indonesia. “Martin Klus juga ingin memperkuat hubungan Parlemen karena sebelumnya ia juga anggota Parlemen Slovakia, hari ini kami ajak mereka berkeliling

Kompleks DPR mulai dari museum hingga ruang-ruang rapat dan mereka senang sekali,” tuturnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengharapkan kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia dengan Slovakia dapat meningkatkan perekonomian yang telah menurun akibat pandemi Covid-19. “Saya rasa hubungan kerja sama dalam bidang tourism ini dapat meningkatkan ekonomi Indonesia dan mereka juga mengundang Parlemen dan masyarakat kita untuk berkunjung ke sana,” sebut politisi Partai Demokrat itu. ■ tn/aha





# Cukai Rokok Naik, Pemerintah Diminta Antisipasi Peredaran Rokok Ilegal

**W**akil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

Anis Byarwati meminta pemerintah mengantisipasi maraknya rokok ilegal setelah ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Hal ini disampaikannya merespons aspirasi dari para pengusaha rokok yang menyampaikan bahwa produksi rokok mereka menurun drastis seiring dengan diberlakukannya kenaikan cukai rokok.

Aspirasi tersebut mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kudus, Kanwil Bea dan Cukai dan perusahaan rokok dalam rangka menerima masukan terkait penelaahan Cukai Hasil Tembakau di Kudus.

“Kami mendapatkan banyak masukan diantaranya terkait kenaikan tarif cukai rokok ini sangat memberatkan para pengusaha rokok, dan tentu saja ini juga terkait dengan daya beli masyarakat juga terganggu. Tapi sisi lain, maksud dari kenaikan cukai rokok dari pemerintah adalah untuk supaya masyarakat lebih sehat,” kata Anis usai pertemuan di Kanwil Bea dan Cukai Jateng-DI Yogyakarta, Semarang, Rabu (13/4).

Anis mengatakan, kenaikan cukai rokok tersebut menyebabkan masyarakat beralih mengonsumsi rokok ilegal. Menurutnya, hal ini meleset jauh dari tujuan diterapkannya kenaikan

cukai rokok yaitu untuk mengendalikan konsumsi rokok karena alasan kesehatan. Sebab dampak lainnya adalah maraknya produksi rokok ilegal.

“Ketika tarif cukai dinaikkan. Kemudian, rokok legal menjadi mahal akhirnya masyarakat justru beralih ke rokok ilegal. Terbukti tadi dari kinerja salah satu kriteria salah satu kriteria dari DJBC Jawa Tengah itu banyak sekali menyita rokok-rokok ilegal di Jepara,” jelas Anis.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI tersebut memastikan aspirasi tersebut akan menjadi masukan BAKN dalam melakukan penelaahan. “Hal ini kan menjadi perhatian dan masukan yang penting bagi kami,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, Anis juga menyampaikan komposisi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang akan diberlakukan mulai tahun depan seiring diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

“Adanya fleksibilitas penggunaan dana untuk kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum

membuat alokasi untuk bidang kesehatan berpotensi meningkat. Pada 2021, pemerintah mengalokasikan 25 persen DBH CHT untuk bidang kesehatan, yakni terkait penanganan dari dampak rokok terhadap kesehatan masyarakat,” jelas Anis.

Lalu, terdapat alokasi 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat yang bersifat fleksibel dan 25 persen untuk penegakan hukum terkait rokok ilegal. Alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat mencakup 15 persen untuk peningkatan kualitas bahan baku dan peningkatan keterampilan kerja, dalam rangka alih profesi atau diversifikasi tanaman tembakau bagi petani tembakau. Sementara 35 persen lainnya untuk pemberian bantuan.

Anis menambahkan, alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat berlaku fleksibel, sehingga dapat dialihkan ke bidang kesehatan jika anggaran telah melebihi kebutuhan daerah. Berbeda dengan alokasi dana untuk penegakan hukum yang bersifat baku atau tidak dapat dialihkan. Pada tahun 2022, terdapat perubahan alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dapat dialihkan ke bidang kesehatan.

■ ann/sf

Wakil Ketua BAKN DPR RI  
Anis Byarwati.  
Foto: Anne/nvl



ANIS BYAWATI  
F. PKS / DKI JAKARTA I

# Sekjen DPR Sosialisasikan Peraturan DPR RI tentang Peliputan di Lingkungan Parlemen

**S**ekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan DPR RI selalu mendukung dan melindungi peran wartawan dalam menjalankan tugas untuk mencari dan menyebarkan informasi di lingkungan parlemen. Untuk itu, pada tahun 2013 lalu, telah diterbitkan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers di DPR RI.

“Peraturan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak ataupun fleksibilitas teman-teman wartawan dalam mencari berita dan informasi di lingkungan DPR,” ujar Indra dalam *Focus Group Discussion* tentang Sosialisasi Peraturan DPR RI tentang Peliputan di lingkungan DPR RI di Jakarta, Kamis (14/4).

Indra menambahkan, peraturan tersebut dibuat agar terjadi kesepahaman dan tercapainya keharmonisan antara DPR RI dengan wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga perlu ada keseimbangan antara kebebasan pers dalam peliputan kegiatan di DPR dengan kelancaran pelaksanaan tugas DPR.

Dalam kesempatan itu, Indra minta agar para wartawan yang juga berkantor di DPR RI turut menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh pihak. Demi ketertiban bersama, ia juga meminta agar setiap wartawan yang meliput kegiatan di DPR RI harus selalu memakai ID Pers DPR RI yang

ruang rapat, juga dilarang melakukan reportase langsung di ruang rapat saat rapat berlangsung guna menjamin kelancaran rapat,” tutur Indra.

Indra melanjutkan, DPR RI saat ini sedang fokus untuk bertransformasi menjadi Parlemen yang modern. Salah satu yang harus diperhatikan adalah keterbukaan akses informasi. “Seluruh hal yang disampaikan sebelumnya, semata-mata demi menjaga kelancaran rekan-rekan wartawan dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Parlemen. Setjen DPR RI pun siap untuk mendukung rekan wartawan yang bertugas di DPR RI, namun diharapkan tetap memperhatikan



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghadiri *Focus Group Discussion* tentang Sosialisasi Peraturan DPR RI tentang Peliputan di Lingkungan DPR RI. Foto: Prima/nvl

”

## PERATURAN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBATASI RUANG GERAK ATAUPUN FLEKSIBILITAS

dikeluarkan oleh Bagian Media Cetak dan Media Sosial Setjen DPR RI.

“Selain itu, wartawan harus bersikap sopan, tertib dan tidak mengganggu terselenggaranya kegiatan di DPR RI serta memperhatikan cara berpakaian, yakni rapi dan sopan. Seluruh wartawan dilarang membuat kegaduhan, merokok, makan dan minum di

kaidah yang ada,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono memaparkan *security management system* yang akan diterapkan di lingkungan DPR RI. Ada tiga hal yang digarisbawahi oleh pria yang akrab disapa Dono ini, yakni keamanan siber, keamanan disinformasi dan keamanan fisik.

“Terkait keamanan fisik, mungkin akan ada hal yang menyebabkan ketidaknyamanan teman-teman wartawan. Tapi yakinlah seluruh rangkaian keamanan yang kami lakukan, adalah untuk kebaikan bersama. Prinsip utamanya adalah aman dan humanis. Sisi humanisnya itu yang akan kita kedepankan,” pungkas Dono menutup pernyataannya. ■ es



# BURT DPR Tinjau Fasilitas dan Layanan di RSKOJ Pertamina Royal Birinangkanaya



Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau fasilitas dan sarpras RSKOJ Pertamina Royal Birinangkanaya di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Eki/ivi

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meninjau kesiapan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya di Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung (RSKOJ) Pertamina Royal Birinangkanaya di Kota Makassar, Senin (11/4).

“Rumah sakit khusus otak dan jantung ini rumah sakit baru, kita datang ke sini untuk memonitor rumah sakit *provider* Asuransi Jasindo yang melayani para anggota dewan dan keluarganya, serta melihat bagaimana pelayanan tidak hanya kepada DPR

tetapi juga kepada masyarakat semuanya. Dan ini adalah satu-satunya rumah sakit otak dan jantung yang ada di Sulawesi Selatan,” papar Novita saat pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan manajemen RSKOJ Pertamina Royal Birinangkanaya.

Novita mengapresiasi fasilitas yang ada di RSKOJ Pertamina Royal Birinangkanaya ini karena telah menggunakan teknologi canggih dan modern, RS ini bisa menjadi rujukan dan direkomendasikan bagi anggota DPR dan keluarganya maupun masyarakat umum. Kendati demikian, Novita berpesan kepada manajemen RS maupun Jasindo sebagai pihak yang menangani kerja sama, untuk memperhatikan kelengkapan data,

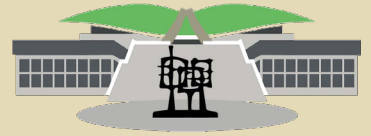
pelayanan dan SOP khususnya yang ada di *front office* yang pertama bertemu dengan anggota atau keluarganya.

“Kemudian sebagai rumah sakit yang menjadi *provider*, harapan kita, tadi juga kita sudah sampaikan kepada pihak rumah sakit dan Jasindo sendiri, bahwa data-data anggota dewan dan peserta semuanya harus lengkap, dan SOP-nya juga bisa disosialisasikan bagaimana seharusnya,” terang politisi Partai Gerindra tersebut.

Senada, Anggota BURT Cen Sui Lan meminta adanya PIC untuk *frontline* yang selalu bertugas, sehingga setiap Anggota Dewan mendapatkan pelayanan yang *full*. “Karena anggota dewan itu yang dalam kartu Jasindo itu kita VVIP. VVIP itu bukan dari kelas servisnya, tetapi dari *person*-nya. Jadi kita harapkan dari PIC di rumah sakit ini untuk mendata dan melayani anggota yang akan berobat di rumah sakit ini,” papar politisi Partai Golkar itu.

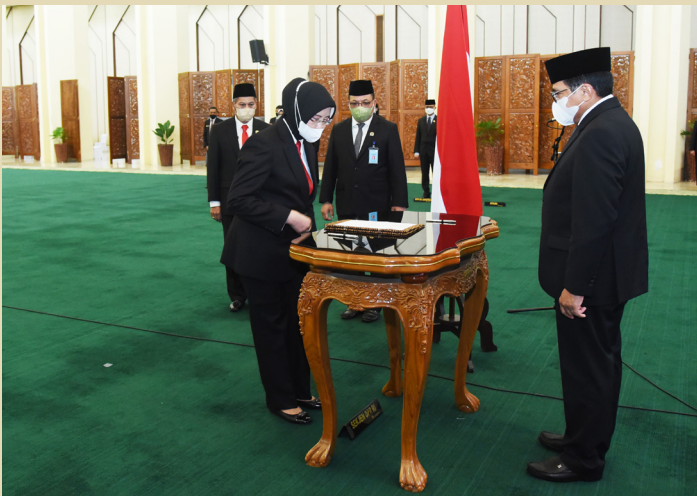
Menanggapi masukan BURT DPR, Direktur Utama di RSKOJ Pertamina Royal Birinangkanaya dr. Muhammad Ahsan mengatakan akan menunjuk satu orang khusus yang menangani dan mengawal Anggota DPR yang berobat di RS yang dipimpinnya. “Jadi di rumah sakit ini sebetulnya sudah ada SOD (Supervisor on Duty) yang kami tunjuk untuk meng-*handle* kegiatan di rumah sakit di setiap *shift*-nya. Namun untuk anggota dewan nanti kami akan menunjuk satu orang khusus untuk melayani anggota yang berobat di sini,” tuturnya. ■ eki/sf





Jakarta, 19 - 21 April 2022, Gedung Nusantara 2 DPR-

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat membuka bakti sosial (baksos) dan bazar yang digelar Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). Foto: Kresno/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memimpin pelantikan pejabat dan pegawai lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4). Foto: Ojji/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghadiri pemberian santunan kepada anak yatim yang digelar Kantor Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4). Foto: Munchen/nvl.

